

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdulla,H. Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Achmad, Abdilla Fauzi, 2012, *Tata Kelola Bernegara dalam Perspektif Politik*, Golden Terayon Press, Jakarta
- Anzar, Dahnil, 2014, *DINASTI RENTE*, BOOKNESIA Kelompok Rakyat Merdeka Online , Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Astawa, I Gde Pantja, 2009, *Problematika Hukum Otonomi Daerah*, PT. Alumni, Jakarta
- Budiarjo, Miriam, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.
- J. Kaloh, 2003, *Kepala Daerah-Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta
- Melfa, Wendy, 2013, *Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*, BE Press, Bandar Lampung
- Prihatmoko, Joko J., 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Siahaan, Maruar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sumitro, Ronny Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.

Usman, Nurhamin Nahar, 2015, *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*, Elex Media Komputindo, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

C. Putusan Mahkamah Konstitusi :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015